



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BLITAR Tahun 2016 – 2021



**Peraturan Walikota Blitar No. 23 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota No. 81 Tahun 2016 tentang Penetapan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016 – 2021 di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar**



KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2021 telah selesai disusun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang sosial, Dinas Sosial Kota Blitar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini merupakan perubahan kedua atas Renstra Dinas Sosial Kota Blitar 2016 – 2021, sehubungan dengan adanya penyederhaan kegiatan dan perubahan sasaran serta indikator sebagai hasil evaluasi SAKIP.

Penyusunan Renstra ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder Dinas Sosial Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya semua pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memberikan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun menuju arah perbaikan agar terwujud Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas.

Akhirnya dengan telah disusunnya Renstra ini, besar harapan kami agar Renstra Dinas Sosial dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Blitar serta memberi kemaslahatan bagi seluruh stakeholder

Rencana Strategis (Renstra)
Dinassosial
Tahun 2016 – 2021

dan masyarakat Kota Blitar di bidang Sosial serta dapat mendorong pencapaian Misi Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang lebih sejahtera pada tahun 2021.

Blitar, 18 Juli 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR



Drs. Ec. PRIYO ISTANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196201181990031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	92
BAB VIII PENUTUP.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, dalam menyusun Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dengan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial maupun Rensra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial 2016-2021 meliputi persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra bukan merupakan dokumen statis sehingga apabila diperlukan dapat diadakan perubahan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan Renstra. Demikian juga dengan Renstra Dinas Sosial, ada beberapa hal menyebabkan perlunya perubahan Renstra Dinas Sosial 2016-2019 untuk yang kedua kalinya, diantaranya :

- a. Hasil evaluasi SAKIP dipandang perlu adanya penyederhanaan kegiatan tahun 2019-2021 juga perubahan sasaran dan indikator program/kegiatan Perangkat daerah.
- b. Hasil evaluasi Renstra Dinas Sosial menyatakan perlu adanya penyesuaian berupa perubahan Renstra Dinas Sosial.
- c. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- d. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- e. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 127) ;
- k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868) ;
- l. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 14);
- n. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);

- o. Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 61); dan
- p. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang sosial selama lima tahun, yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Sosial selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016 – 2021:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Blitar diatur dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2016, Dinas Sosial Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Sosial kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keperintisan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Sumbangan Sosial.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial;
- 3) penyelenggaraan urusan administrasibidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;

- 4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 7) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 8) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 9) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 10) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 11) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 12) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 13) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui *sub domainwebsite* Pemerintah Daerah;
- 14) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 15) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun rincian tugas antara lain :

- a. **Kepala Dinas** mempunyai tugas : menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.
- b. **Sekretaris** mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan dinas;

Untuk menjalankan tugasnya Sekretaris Dinas Sosial Kota Blitar menjalankan fungsi :

- 1) pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- 2) pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
- 3) pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- 4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 6) pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 7) pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 8) fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 9) pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi Dinas;
- 10) pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- 11) pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- 12) pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- 13) fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 14) fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 15) fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 16) pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;

- 17) penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - 18) fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - 19) fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial;
 - 20) pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 21) fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - 22) fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 23) fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - 24) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 25) pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
 - 26) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - 27) pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - 28) pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. **Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menjalankan fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
 - 2) penyusunan program/kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- 3) penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- 4) pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 5) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan badan/organisasi sosial negeri / swasta serta usaha masyarakat di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 6) pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 7) pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, balita/anak, anak nakal, anak terlantar, anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial, lansia di luar panti dan/atau lembaga serta advokasi permasalahan sosial;
- 8) pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penyandang disabilitas, anak nakal, anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial ,korban narkoba, advokasi permasalahan sosial serta tuna susila;
- 9) pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial ;
- 10) pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas pelayanan dan rehabilitasi sosial ;
- 11) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta pendataan penyandang disabilitas, balita/anak, anak nakal, anak terlantar, anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial, lansia, advokasi permasalahan sosial;
- 12) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS(ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 13) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 14) pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- 15) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 16) pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
- 17) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

d. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan fungsi :

- 1) menyiapkan serta mengumpulkan data penyusunan kegiatan pemberdayaan sosial;
- 2) menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 3) merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- 4) melaksanakan kebijakanteknis,fasilitasi, koordinasi,serta pemantauandanevaluasipemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 5) melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 6) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 7) pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 8) pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi sosial masyarakat;
- 9) pelaksanaankebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaansosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
- 10) pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan;
- 11) pencatatan/pendataan, pengaturan dan registrasi tanah makam pada Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) pelayanan pengangkatan serta pemakaman jenazah dan rangka jenazah (jenazah pahlawan, Veteran dan masyarakat lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 13) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 14) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota;
- 15) pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan;
- 16) melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. **Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

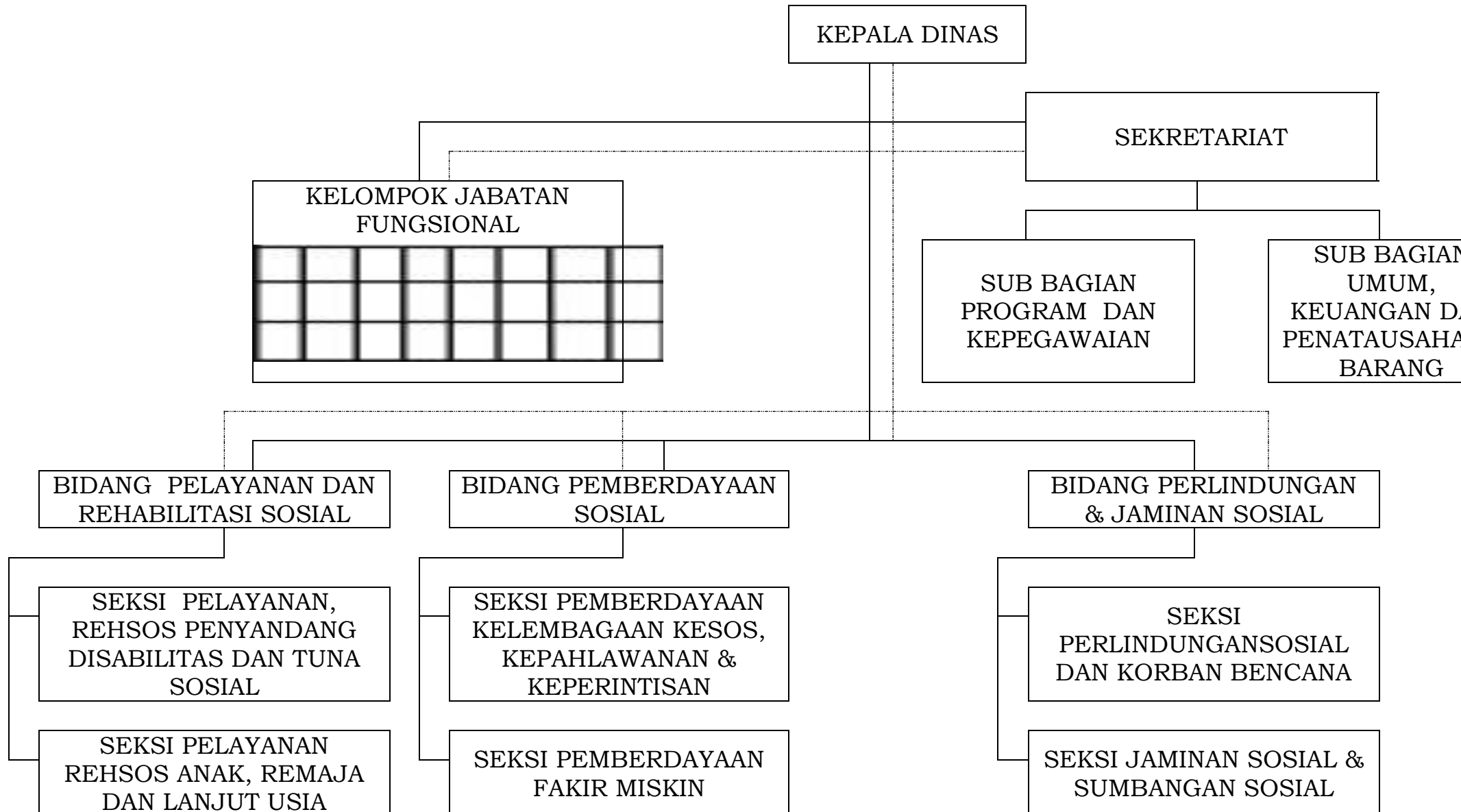
- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, orang telantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 5) Pengawasan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar

**Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021**

bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas dan peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Jumlah Sumber daya manusia dilingkungan Dinas Sosial Kota Blitar sebanyak 25 orang terdiri dari 24 PNS dan 1 orang PTT. Kondisi pegawai Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan golongan/kepangkatan dan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	IV/c	1 orang
2	IV/a	3 orang
3	III/d	6 orang
4	III/c	3 orang
5	III/b	1 orang
6	III/a	1 orang
7	II/c	4 orang
8	II/b	1 orang
9	II/a	3 orang
10	I/d	1 orang
11	PTT	1 orang
Total		25 orang

Sumber data : Dinas Sosial 2018

Tabel 2.2.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S2 (Pasca Sarjana)	1 orang
2.	S1 (Sarjana)	12 orang
4.	Diploma III	1 orang
5.	Diploma II	1 orang
6.	SLTA	9 orang
7.	SLTP	1 orang
	Jumlah	24 orang

Sumber data : Dinas Sosial 2018

b. Sarana Dan Prasarana

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kota Blitar, antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung dengan luas bangunan 1.500 M ²	1 Unit	Baik/Terawat
2.	Mobil	3 Unit	Baik/Terawat
3.	Sepeda Motor	8 Unit	Baik/Terawat
4.	Komputer PC	21 Unit	Baik/Terawat
5.	Laptop	14 Unit	Baik/Terawat
6.	Notebook	1 Unit	Baik/Terawat
7.	Mesin ketik manual	1 Unit	Baik/Terawat
8.	TV	5 Unit	Baik/Terawat
9.	Kamera	3 Unit	Baik/Terawat
10.	AC	21 Unit	Baik/Terawat
11.	APAR	8 Unit	Baik/Terawat
12.	Brankas	1 Unit	Baik/Terawat
13.	Pesawat telpon	3 Unit	Baik/Terawat
14.	Mesin Fax	2 Unit	Baik/Terawat
15.	Meja Kursi tamu	7 Unit	Baik/Terawat
16.	Meja kursi rapat	1 set	Baik/Terawat
17.	Meja kursi Eselon 2	1 set	Baik/Terawat
18.	Meja kursi Esselon 3	4 Unit	Baik/Terawat
19.	Meja kursi Esselon 4	8 set	Baik/Terawat
20.	Meja kursi kerja Staf	11 set	Baik/Terawat
21.	Almari	7 unit	Baik/Terawat
22.	Filing kabinet	5 Unit	Baik/Terawat

Sumber data : Dinas Sosial 2018

Dari kondisi tersebut beberapa penunjang pelayanan yang masih membutuhkan penambahan antara lain mobil TRC, kendaraan dinas roda 2 dan shelter/sarana prasarana pelayanan Lansia terlantar dan PMKS lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Peragkat Daerah

Dinas Sosial Kota Blitar mengemban misi ketiga Kota Blitar yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan tujuan meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat.

Disamping itu Dinas Sosial juga menyelenggarakan urusan wajib sosial yang bertugas melaksanakan pelayanan dasar sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Persentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Persentase PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
3. Persentase panti sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Persentase korban bencana skala kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat;
6. Persentase korban bencana skala Kabupaten/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;
7. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial;

Berbagai program dan kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan secara berkelanjutan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra maupun Renja yang telah disusun. Program dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial maupun pencapaian kinerja berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal.

Secara garis besar program/kebijakan bidang sosial dalam rangka penanganan masalah sosial antara lain :

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

1. Pemberian bantuan sembako bagi warga miskin yang menderita sakit/terkena musibah lainnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar saat berkurang/hilangnya sebagian pendapatan mereka ketika sakit/terkena musibah;
2. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan uang tunai bersyarat dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang didalamnya ada ibu hamil, anak sekolah atau anak Balita. Dalam program ini Dinas Sosial melakukan pendampingan dengan melibatkan tenaga pendamping sebanyak 5 orang dan operator 1 orang, dan dengan bertambahnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat maka pada tahun 2017 tenaga pendamping PKH menjadi 11 orang dan operator sebanyak 2 orang.
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warung (Warung Gotong Royong Elektronik)/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Penerima manfaat program ini adalah KPM PKH dan Non PKH.
4. Pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain melaksanakan penertiban PMKS jalanan berkerja sama dengan SATPOL PP, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan TKSK dimana PMKS yang terjaring dari operasi penertiban dilakukan pembinaan sosial dan bagi yang potensial diberikan pelatihan keterampilan bekerja sama dengan UPT Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
5. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemberian bantuan asistensi penyandang disabilitas berat sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah bantuan Rp. 300.000 per bulan, bantuan asistensi lanjut usia 50 (lima puluh) orang dengan jumlah bantuan Rp. 200.000 per bulan dan bantuan kepada korban pasung dan/atau keluarganya yang penganggarnya

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

bersumber dari Kementerian Sosial RI dan APBD Propinsi Jawa Timur ;

6. Mengupayakan peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pembinaan dan Bimtek-Bimtek kepada TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana dalam rangka memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial secara maksimal.
7. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi PMKS terlantar Dinas Sosial Kota Blitar terus menjalin kerja sama dengan panti sosial yang ada di Kabupaten/Kota Blitar dan panti sosial di wilayah Jawa Timur;
8. Memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha kepada PMKS dengan harapan setelah mengikuti pelatihan mereka bisa langsung merintis usaha mandiri;
9. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai – nilai sejarah dengan kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopember dan Peringatan Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dengan agenda rutin Pementasan Drama Kolosal mengenang jiwa patriotik Sudanco Supriyadi dan Tentara PETA dalam memperjuangkan kemerdekaan RI di Kota Blitar dari penjajahan Jepang serta sarasehan kepahlawanan dan berbagai lomba antar pelajar sebagai upaya menumbuhkan jiwa patriotis dan nasionalis generasi penerus bangsa;

Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar periode 2011 sampai dengan 2017 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	INDIKATOR SPM															
1.	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	56	77,28	77,28	77,28	80	76,3	76,3	76,3	82,85	83,12	136,25	98,73	98,73	107,20	103,9
2.	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	23,8	40	54	65	80	23,8	23,8	23,8	2,34	2,60	100	59,5	44,07	4,33	3,25
3.	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	80%	80%	80%	80%	85,5	85,5	85,5	81,8	100	106,87	106,87	106,87	102,25	125
4.	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	9,5%	24%	35%	56%	60%	100	100	100	100	100	1.052	416,66	285,71	178,57	166,66
5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	80%	80%	80%	80%	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten /kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%	80%	80%	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5%	15%	26%	35%	40%	0,08	0,08	0,08	5,14	38	1,6	0,5	0,31	14,68	95
II	INDIKATOR KINERJA															
1	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan	28	213	150	157	142	28	188	106	157	142	100	88,26	70,67	100	100
2	Jumlah pelayanan PMKS	97	200	200	248	105	97	147	145	248	128	100	73,5	72,5	100	121,9
3	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan	59	82	98	125	135	59	82	98	125	135	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun 2016-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INDIKATOR SPM						
1.	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	80%	100%	100%	125	125
2.	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	80%	0%	3,68%	0	4,6
3.	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	80%	100%	100%	125	125
4.	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	60%	100%	100%	166,67	166,67
5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	80%	80%	100%	100%	0	125
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten /kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%	0	0	0	0
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	40%	16,5%	41%	41,25	102,5
II	INDIKATOR KINERJA						
1	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100%	100%	100	100
2	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial	75	78	100%	100%	133,33	128,21
3	Persentase PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	65	68	100%	100%	153,85	147,05
4	Persentase PMKS terlatih	15	20	15%	16,24%	100%	81,2

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Program dan kegiatan dalam rangka pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tercapai sesuai target berkat dukungan anggaran yang mencukupi, semangat dan komitmen yang kuat SDM Dinas Sosial serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Kota Blitar belum memiliki panti pelayanan sosial namun panti yang dikelola pihak swasta sangat mendukung program pelayanan sosial bagi PMKS di Kota Blitar. Kepedulian terhadap masalah sosial, keiklasan, niat tulus dari lembaga-lembaga sosial serta penyediaan sarana prasarana panti yang memadai menjadikan pelayanan kesejahteraan sosial berjalan sesuai harapan. Disamping itu peran Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebagai alat, wadah, sarana maupun media yang digunakan masyarakat untuk melakukan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan juga sangat membantu dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial karena masalah kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Di Kota Blitar ada 2 unit WKSBM yang terbentuk dan semuanya aktif dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Kelompok Usaha Bersama atau KUBE adalah salah satu program strategis untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan spesifik melalui tahapan membangun kesadaran berkelompok untuk kemandirian masyarakat miskin, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, ekonomi produktif dengan mengembangkan usaha yang mampu memberi nilai tambah ekonomis dan kemandirian. Di Kota Blitar program ini belum berjalan sesuai harapan karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama masyarakat miskin tentang arti penting dan manfaat KUBE, disamping belum adanya pegawai fungsional atau petugas teknis yang mempunyai kompetensi memadai dalam memotivasi dan pendampingan terhadap KUBE.

Selama kurun waktu 2011-2015 bantuan sosial terhadap cacat fisik, mental dan lansia tidak potensial pada awal-awal periode masih belum mencapai target yang diinginkan, namun di akhir periode program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 90,48% berkat dukungan anggaran yang memadai dan pada tahun 2017 naik menjadi 95%.

Pada tahun 2014 terjadi bencana alam letusan gunung Kelud yang lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar dan Malang, namun imbasnya bagi Kota Blitar tidak sampai menyebabkan kerugian moril/materiil sehingga tidak membutuhkan bantuan sosial bagi korban bencana dan evakuasi korban bencana dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 terjadi bencana angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan rumah penduduk katagori rusak ringan sampai dengan berat dan semua korban telah memperoleh bantuan sosial selama tanggap cepat darurat namun tidak menimbulkan korban jiwa serta tidak memerlukan evakuasi korban dengan sarapa dan prasarana tanggap darurat lengkap.

Program pelatihan keterampilan bagi PMKS utamanya warga miskin dilakukan setiap tahun sebagai upaya menurunkan angka PMKS. Target PMKS terlatih pada tahun 2017 sebesar 20% baru mencapai 16,24% karena program ini dianggarkan melalui DBHCHT dan sebagian besar anggaran terserap pada belanja bantuan sosial bahan/peralatan usaha dengan harapan setelah mengikuti kegiatan pelatihan mereka bisa langsung merintis wirausaha baru.

Dalam hal pelayanan PMKS Dinas Sosial telah menjalin jejaring kerjasama dengan pilar-pilar sosial utamanya PSKS dan lembaga-lembaga swasta/panti sosial sehingga pelayanan yang diberikan bisa sampai tuntas sesuai jenis pelayanan yang diajukan. Sedangkan peningkatan kapasitas PSKS dalam pelayanan PMKS dilakukan melalui pembinaan/bimtek yang dilaksanakan rutin setiap tahun.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Sosial Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Rata – rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	1.390.940.121	1.989.190.136	1.986.183.300	1.992.306.619	1.911.770.465	1.416.872.825	1.852.840.879	1.750.269.365	1.670.162.154	1.875.805.743	97,07	93,4	88,12	83,83	98,12	9,78	8,24
Belanja Langsung	4.311.821.163	3.047.963.300	4.018.665.400	4.856.625.150	6.010.265.745	4.236.197.058	2.848.623.242	3.331.553.883	4.087.547.682	3.787.039.498	97,07	93,46	82,90	84,16	62,68	11,16	0,11
TOTAL	5.702.761.284	5.190.228.636	9.455.235.450	8.316.579.819	8.940.227.410,35	5.653.069.883	4.850.015.121	7.951.034.448	7.187.811.070	6.593.938.441	99,13	93,45	84,09	86,43	73,76	17,16	7,97

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Sosial Tahun 2016-2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke		Realisasi Capaian Pada Tahun Ke		Rasio Capaian Pada Tahun Ke		Rata – rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA DAERAH								
Belanja Tidak Langsung	2.328.799.315	2.161.905.000	2.320.336.936	1.811.428.124	99,64	83,79	-7,17	-21,93
Belanja Langsung	5.888.779.950	20.822.284.676	5.584.069.080	20.348.863.449	97,73	97,73	253,59	264,41
TOTAL	8.217.579.265	22.984.189.676	7.904.406.016	22.160.291.573	96,19	96,42	179,70	197,09

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel 2.3 dapat dibaca capaian serapan anggaran tertinggi selama kurun waktu 2011-2015 yaitu pada tahun 2011 sebesar 99,13% sedangkan terendah pada tahun 2015 sebesar 73,76%. Rendahnya capaian terhadap penyerapan anggaran karena dilakukan efisiensi terhadap anggaran namun kinerja program/ kegiatan dapat dicapai sesuai target. Sedangkan table 2.3.4 pada belanja tidak langsung terjadi penurunan anaggaran karena pada tahun 2017 sesuai Perwali Kota Blitar nomor 61 tahun 2016 terjadi perubahan SOTK dimana sebelumnya nomenklatur Dinas Sosial adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga tahun 2017 jumlah pegawai berkurang. Sedangkan Belanja Langsung mengalami kenaikan yang cukup drastis karena pada tahun 2017 anggaran bantuan sosial beras sejahtera daerah (Rastrada) yang semula berada pada kecamatan beralih pada Dinas Sosial Kota Blitar.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan sosial terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Blitar ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka adalah penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangat tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial antara lain :

- a. Kultur budaya masyarakat yang lebih mengandalkan bantuan langsung yang bersifat konsumsi daripada bantuan yang bersifat usaha
- b. Meningkatkan akses dan sarana prasarana pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Tuntunan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- d. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018

Beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b. Tingginya komitmen Kepala daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan terhadap PMKS
- c. Adanya program pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan masalah sosial yang menjangkau sampai wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Upaya penanganan masalah sosial terus menerus diupayakan, namun seiring dengan perkembangan dan keterbukaan informasi global maka permasalahan sosial juga semakin kompleks. Penanganan masalah sosial yang menjadi prioritas Kota Blitar adalah upaya penurunan jumlah PMKS. Berdasarkan data tahun 2013 sampai dengan 2017 penurunan PMKS hanya terjadi pada tahun 2014 dan 2016, sementara jumlah PMKS pada tahun 2013, 2015 dan 2017 justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menuntut kerja keras pemerintah utamanya Dinas Sosial dalam rangka mengatasi permasalahan ini.

Disamping itu upaya pelayanan terhadap PMKS khususnya PMKS terlantar belum begitu efektif karena di Kota Blitar belum memiliki panti rehabilitasi milik pemerintah, sedangkan panti sosial yang dikelola Dinas Sosial Provinsi kapasitasnya sangat terbatas.

Keterbatasan SDM dalam upaya penanganan PMKS baik secara kuantitas maupun kualitas saat ini belum sebanding dengan permasalahan sosial yang dihadapi. Dari 26 kelompok PMKS belum semua mendapatkan penanganan yang intensif. Oleh karena itu optimalisasi peran dan fungsi pilar-pilar kesejahteraan sosial merupakan peran yang sangat penting dalam pelayanan terhadap PMKS.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masalah sosial yang semakin kompleks	Penanganan masalah sosial belum dilakukan secara komprehensif	Tingginya angka PMKS

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai
		Belum adanya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap PMKS utamanya PMKS terlantar milik pemerintah
		Kurangnya tingkat kemandirian PMKS
		Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesejahteraan sosial

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

1) Visi

Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka program Dinas Sosial Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan program Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Penjelasan dari Visi tersebut sebagai berikut:

a. Kota Blitar Semakin Sejahtera

Merupakan peningkatan dari kondisi sejahtera dimana sejahtera merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif, dalam tata kehidupan dan juga tata pemerintahan yang aman, tentram, rukun dan damai.

Disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Hal ini ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat, yang kesemuanya harus bias dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

2) Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sdm yang cerdas dan berdaya saing tinggi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif;

5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kota Blitar tahun 2016-2021 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Blitar terkait dengan misi ke-3 yaitu **Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan**, yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Memantapkan pengembangan industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif;
- c. Meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, insfrastruktur dan penataan ruang.

Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari Misi ke-3 di atas, Dinas Sosial secara langsung terkait dengan tujuan pada huruf e yaitu **“Meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat”** dengan sasaran **“Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan”**. Adapun indikator dari sasaran tersebut ialah Pencapaian Indeks Gini.

Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas Sosial Kota Blitar sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan.

Dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Blitar masih mengalami beberapa hambatan diantaranya masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga

masyarakat, jumlah PMKS yang naik turun, ketidaksinergisan penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku jabatan, dan penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kota Blitar yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan.

Dalam perjalanan pelaksanaan program kegiatan tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berorientasi Pada Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan	1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dengan melihat populasi PMKS yang besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumberdaya yang disediakan	1.1 Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya 1.2 Tidak tersedianya	1. Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas/masyarakat, seperti pilar kesejahteraan sosial (karang taruna, orsos, PSM,

		dan intervensi yang telah dilakukan	program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan sosial	PSKS, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR)
--	--	-------------------------------------	---	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Arah kebijakan Kementerian Sosial adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif melalui :

- (1) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, strategi yang ditempuh adalah:
 - (a) Penataan asistensi sosial, pemenuhan hak dasar dan inklusifitas penyandang disabilitas, lansia dan masyarakat marginal,
 - (b) Perluasan cakupan sistem jaminan sosial nasional bagi penduduk miskin dan rentan, serta pekerja sektor informal,
 - (c) Penguatan kelembagaan dan kordinasi melalui penguatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial,
 - (d) Realisasi kelembagaan kesos, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu.
 - (e) Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan.
 - (f) Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria standarisasi dan pengelolaan data terpadu.
 - (g) Penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu tingkat kabupaten kota hingga desa dan kelurahan.
- (2). Pengembangan penghidupan berkelanjutan/ peningkatan kesejahteraan keluarga, strategi yang ditempuh :

- (a). Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif
 - (b) Terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan kehidupan penduduk miskin dan rentan.
- (3).Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.Strategi yang ditempuh :
- (a) Pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam pemberdayaan pelayanan sosial,
 - (b) Pengembangan dan peningkatan kualitas berbasis institusi masyarakat dan keluarga,
 - (c) Penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
 - (d) Meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial,
 - (e) Penyelenggaraan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial,
 - (f) Penguatan peran pemerintah pusat daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial,
 - (g) Peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Tujuan Umum pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur adalah “meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat untuk tercapainya derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan khusus pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- (1) Terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung
- (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta profesionalisme pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Meningkatkan aksesibilitas para penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar
- (4) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan
- (5) Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial
- (6) Meningkatkan dan melembaganya modal sosial sebagai landasan utama pembangunan kesejahteraan sosial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah **“Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”**.

Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat sustain/ berkelanjutan.

Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

- a. Wisata Kebangsaan;** Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya.
- b. Pengembangan sektor pertanian;** pengembangan sektor pertanian akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar.
- c. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa;** adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut.
- d. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;** Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan.

Memperhatikan tujuan penataan ruang Kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kesejahteraan sosial maka akan berusaha, Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para PMKS dan Korban Bencana. Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan korban bencana dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan berinteraksi sosial dan keberfungsian sosial secara lebih optimal sehingga mereka mampu mengatasi berbagai persoalan sosial dan mewujudkan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bergerak di Bidang Sosial secara professional dan humanis.

Selanjutnya tentang Rencana Kawasan Peruntukan lainnya dalam Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030, pasal 64 dan 65 disebutkan bahwa :

Kawasan peruntukan lainnya meliputi :

- a. kawasan ruang evakuasi bencana alam;
- b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. kawasan peruntukan pelayanan umum.

Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi :

- a. Sekolah;
- b. Balai pertemuan;
- c. Kantor Kelurahan;
- d. Kantor Kecamatan;
- e. GOR Soekarno Hatta;
- f. Rumah sakit;
- g. Taman Kota; dan
- h. Ndalem Gebang.

Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.

Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut penanganan bencana, maka sasaran Dinas Sosial Kota Blitar adalah Penanggulangan bencana informal yaitu unsur Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Agar potensi Penanggulangan Bencana berfungsi secara optimal diperlukan proses pembelajaran agar lebih handal.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya pelatihan dan pendidikan yang terorganisir, terukur dan sistematis. Tanpa pendidikan dan pelatihan maka dipastikan tidak terciptanya masyarakat yang handal dalam Penanggulangan Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Proses terbentuknya TAGANA sebagai potensi Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat yang terlatih, maka salah satu pedoman pelatihan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pelatihan yaitu TAGANA terlatih.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan maka ditetapkan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dari daftar isu-isu pembangunan berkelanjutan dilakukan pembobotan dengan mengkombinasikan dengan beberapa kriteria yang sesuai dengan kondisi dan situasi Kota Blitar. Dari hasil pembobotan tersebut ditetapkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang dipilih untuk dianalisis, berdasarkan hasil verifikasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait, antara lain :

1. Terjadinya pengikisan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal

2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
4. Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
5. Penurunan luasan lahan pertanian

Isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar tidak hanya yang tersebut di atas, namun masih banyak yang lainnya. Isu pembangunan di bidang sosial adalah tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan salah satu dari long list atau daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan bidang sosial tersebut ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat yang dituangkan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Peningkatan penanganan PMKS yang dituangkan melalui program :
 - Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan data pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar dan permasalahan yang dihadapi maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mendorong upaya kemandirian PMKS
3. Peningkatan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas yang memadai
4. Penguatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
5. Peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Pentingnya keberadaan sarana prasarana perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kota Blitar akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kota Blitar beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Blitar 2016

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan	Indeks Gini	Rumus Kalkulator Indeks Gini	0,36	0,41
2	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	$\frac{(N-1) - N}{(N-1)} \times 100\%$ <p>(N-1) : Jml PMKS tahun lalu N : Jml PMKS tahun ini</p>	7,16%	100%

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Blitar 2017

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan	Indeks Gini	Rumus Kalkulator Indeks Gini	0,36	0,39
2.	Sasaran :	Persentase penurunan PMKS	$\frac{(N-1) - N}{(N-1)} \times 100\%$ (N-1) : Jml PMKS tahun lalu N : Jml PMKS tahun ini	19,96%	-1,29%
a.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS				
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah yang sudah dilayani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	82%	100%
c.	Meningkatnya pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$	98%	100%

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Blitar 2018

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan	Indeks Gini	Rumus Kalkulator Indeks Gini	0,36
2. a.	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	$\frac{(N-1) - N}{(N-1)} \times 100\%$ (N-1) : Jml PMKS tahun lalu N : Jml PMKS tahun ini	1%
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah yang sudah dilayani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	82%
c.	Meningkatnya pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah Potensi SumberKesejahteraan sosial (PSKS)yang dibina dan aktif dalampenyelenggaraankesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$	98%

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Blitar 2019-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA		
				TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
1	2	3	4	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan	Indeks Gini	Rumus Kalkulator Indeks Gini	0,36	0,36	0,36
2.	Sasaran :	Persentase Penurunan PMKS	$\frac{(N-1) - N}{(N-1)} \times 100\%$ (N-1) : Jml PMKS tahun lalu N : Jml PMKS tahun ini	1%	1%	1%
a.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS					
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah yang sudah dilayani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	85%	90%	90%
c.	Meningkatnya pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$	99%	100%	100%

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA		
				TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
1	2	3	4	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase fakir miskin yang mandiri	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin yang dilatih yang sudah bekerja/berusaha}}{\text{Jumlah fakir miskin yang dilatih}} \times 100\%$	10%	10%	10%

Dalam upaya pembangunan di bidang sosial pada tahun 2018 sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan jenis pelayanan dasar SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 4.5

Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Dasar Sosia Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN
Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	<p>Indikator : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>Target : 100%</p>	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p>X = Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>Y = Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p>

SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN
<p>Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota</p>	<p>Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p> <p>Target : 100%</p>	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p>X = Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Y = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota</p>

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Sosial menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/pejuang, dan Threats/tantangan*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. KEKUATAN (S)

- a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial
- b. Tugas Penanganan masalah sosial lainnya masih ada keterkaitan dengan SKPD lainnya
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas PMKS di masyarakat
- d. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial
- e. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- f. Tersedianya anggaran dan SOP layanan

2. KELEMAHAN (W)

- a. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
- c. Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia

- d. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial
- e. Belum adanya kerja sama penanganan masalah kesejahteraan sosial
- f. Belum adanya sarana prasarana pelayanansocial untuk Lansia dan PMKS lainnya

3. PELUANG (O)

- a. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat
- b. Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)
- c. Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial
- d. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat

4. TANTANGAN (T)

- a. Tingginya jumlah penduduk miskin
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Masyarakat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha
- Setelah identifikasi dilakukan, kemudian dirumuskan ke

dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - a. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait
 - b. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial
 - c. Optimalisasi program Penanganan PMKS
 - d. Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah:
 - a. Membuat jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
 - a. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS
 - d. Melibatkan partisipasi masyarakat
 - e. Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah

- a. Menurunkan jumlah fakir miskin
- b. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan teraan tenaga kerja dan PMKS
- c. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang social untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah social lainnya

Uraian diatas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

<p>INTERNAL</p> <p style="text-align: right;">EKSTERNAL</p>	<p><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial b. Tugas Penanganan masalah sosial lainnya masih ada keterkaitan dengan SKPD lainnya c. Peningkatan kualitas dan produktifitas PMKS di masyarakat d. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial e. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia f. Tersedianya anggaran dan SOP layanan 	<p><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana c. Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia d. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial e. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial f. Belum adanya sarana prasarana pelayanan social untuk Lansia dan PMKS lainnya
<p><u>PELUANG (O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat b. Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) c. Kebijakan nasional tentang 	<p><u>STRATEGI S + O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait b. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial 	<p><u>STRATEGI W + O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS b. Melibatkan partisipasi masyarakat c. Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial

<p>kesejahteraan sosial</p> <p>d. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat</p>	<p>c. Optimalisasi program Penanganan PMKS</p> <p>d. Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial</p>	<p>masyarakat dan panti milik masyarakat</p>
<p><u>TANTANGAN (T)</u></p> <p>a. Tingginya jumlah penduduk miskin</p> <p>b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>c. Masyarakat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha</p>	<p><u>STRATEGI S + T</u></p> <p>a. Membuat jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial</p>	<p><u>STRATEGI W + T</u></p> <p>a. Menurunkan jumlah fakir miskin</p> <p>b. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dan PMKS</p> <p>c. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya</p>

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu:

1. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait
2. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial
3. Optimalisasi program Penanganan PMKS
4. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS
5. Melibatkan partisipasi masyarakat
6. Membuat jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial
7. Menurunkan jumlah fakir miskin
8. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dan PMKS

9. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya

Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka panjang waktu penyampaiannya jelas, berorientasi pada hasil nyata. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai misi yang ada, maka kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2016-2021 diarahkan kepada penurunan angka kemiskinan guna peningkatan mutu sumber daya dan kesejahteraan sosial. Berikut ini dijelaskan keterkaitan dan keselarasan antara misi, sasaran serta pencapaiannya melalui kebijakandan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Blitar dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 5.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Sosial Kota Blitar

Visi RPJMD	Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021		
Misi RPJMD	Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Meningkatkan kemandirian PMKS	Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Optimalisasi kerja sama dengan OPD terkait serta partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait	Peningkatan pelayanan PMKS dengan melibatkan daya dukung seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat dan lembaga dalam pelayanan kesejahteraan sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Meningkatkan kemandirian fakir miskin dan optimalisasi peran PSKS	memperkuat ekonomi keluarga fakir miskin dan pemberdayaan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat dan lembaga dalam pelayanan kesejahteraan sosial

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2016-2021. Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari tujuan sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1	06	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Lainnya	Jumlah PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat	100%	100%	564,646,712	100%	458,009,257	Bidang Sosial	Kota Blitar
						01	Kegiatan Fasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta pembinaan PKH	1250 org	1298 org	210,824,600	1120 org	173,952,850		
						02	Kegiatan Fasilitasi Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang sakit atau menerima musibah lain yang menerima sembako	65 org	158 org	300,041,700	158 org	247,331,400		
								Jumlah data PBI JKN yang terverifikasi	1 dok	1 dok		1 dok			
						03	Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-Orang Terlantar dan PMKS Lainnya	Jumlah PMKS (psikotik/eks psikotik/terlantar) yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat lanjutan ke pusat rehabilitasi/panti/yayasan/pndok/rumahnya/dll	1 org	1 org	53,780,412	1 org	36,725,007		
								Jumlah klien hasil razia/penjaringan gepeng/PMKS lainnya yang dibina	20 org	18 org		18 org			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah pelayanan/pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal	25 org	25 org		91 org				
							Jumlah psikotik yang bebas pasung	14 org	2 org		2 org				
							Jumlah fasilitasi PMKS terlantar selama pengobatan/perawatan di rumah sakit/pusat rehabilitasi/yayasan/pondok/rumahnya dll	5 org	5 org		5 org				
			1	06	06		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	75%	75%	421,712,188	100%	402,345,538	Bidang Sosial	Kota Blitar
						01	Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah peserta kegiatan Tagana Goes to School	300 org	300 org	220,242,500	300 org	212,500,350		
							Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	30 org	30 org		30 org				
							Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana	30 org	30 org		30 org				
							Jumlah peserta bimtek relawan kebencanaan	30 org	30 org		30 org				
							Jumlah pemeliharaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana	0 unit	2 unit		2 unit				
						02	Kegiatan Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial	Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti tetirah di PSPA Batu	50 org	50 org	63,597,188	50 org	63,597,188		
							Jumlah fasilitasi adopsi anak	0 org	1 org		1 org				

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
					03	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti kegiatan HLUN	2000 org	2000 org	137,872,500	2000 org	126,248,000		
							Jumlah peserta pembinaan Karang werda/Lansia	75 org	75 org		75 org			
							Jumlah peserta sarasehan Lansia	200 org	200 org		200 org			
			1	06	07	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	% lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	85%	91%	2,118,883,584	91%	1,996,465,554	Bidang Sosial	Kota Blitar
					01	Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	1 unit	1 unit	74,287,900	1 unit	68,682,500		
					02	Pembinaan Juru Kunci Makam	Jumlah Juru Kunci yang dibina	87 org	89 org	48,715,900	89 org	48,455,900		
					03	Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan	Jumlah peserta peringatan HUT PETA	1000 org	1000 org	200,140,000	1000 org	179,677,500		
							Jumlah peringatan hari Pahlawan	1 peringatan	1 peringat		1 peringat			
							Jumlah peserta sarasehan kepahlawanan	300 org	300 org		300 org			
							Jumlah peserta lomba melukis	0 org	250 org		250 org			
							Jumlah perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	65 org	65 org		65 org			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
					04	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Pertuni, PWRI dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	132 org	132 org	627,495,484	132 org	583,383,250		
							Jumlah anak yatim yang mengikuti peringatan tahun baru Islam	586 org	586 org		568 org			
					05	Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna dan LKSA yang mengikuti bimtek	70 org	70 org	321,244,300	70 org	276,387,900		
							Jumlah PSM dan TSKK yang mengikuti Bimtek	47 org	47 org		44 org			
			1	06	08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	% PMKS terlatih	10%	15%	847,000,000	15%	839,878,504	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
					06	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja dan masyarakat di Bidang Sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan	621 org	310 org	847,000,000	310 org	839,878,504		
			1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	698,785,666	100%	686,520,502	Sekretariat	Kota Blitar
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai dan perangko yang tersedia	100 bh	1200 bh	5,640,000	1200 bh	5,459,640		
							Jumlah surat yang dikirim melalui jasa pengiriman	50 bh	50 bh		45 bh			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rek	4 rek	85,200,000	4 rek	78,752,343		
					03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	13 unit	13 unit	22,500,000	13 unit	18,772,576		
					04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kerja yang terbayarkan	12 bln	12 bln	10,380,000	12 bln	10,200,000		
					05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	47 jenis	47 jenis	38,429,050	47 jenis	38,427,750		
					06	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	9 jenis	9 jenis	33,696,800	9 jenis	33,696,800		
					07		Jumlah lembar penggandaan	65000 lb	73109 lb		73109 lb			
					08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	4 jenis	4 jenis	16,600,000	4 jenis	16,600,000		
					09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	8 jenis	12 jenis	134,687,016	12 jenis	133,465,000		
					10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	29 jenis	29 jenis	16,154,000	29 jenis	16,154,000		
					11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	1 jenis	1 jenis	21,020,000	1 jenis	21,020,000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos mamin yang tersedia	500 dos	600 dos	32,310,000	600 dos	31,897,500		
						13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rapat	68 rapat	282,168,800	68 rapat	282,074,893		
			1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	169,021,000	100%	168,575,432	Sekretariat	Kota Blitar
						01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	31,038,000	1 unit	31,038,000		
						02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 unit	3 unit	98,416,000	3 unit	97,988,432		
						03	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	8,275,000	3 jenis	8,275,000		
						04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	23,092,000	5 jenis	23,074,000		
						05	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Jumlah jenis mebelair yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	8,200,000	4 jenis even	8,200,000		
			1	06	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100%	100%	92,087,500	100%	91,087,500	Sekretariat	Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
					01	Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	3 even	3 even	62,587,500	3 even	62,587,500		
					02	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2 jenis	2 jenis	29,500,000	2 jenis	28,500,000		
			1	06	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	33,932,000	100%	33,717,000	Sekretariat	Kota Blitar
					01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	2 dok	2 dok	20,140,000	2 dok	20,125,000		
					02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3 dok	3 dok	7,036,000	3 dok	6,931,000		
					03	Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	7 dok	7 dok	6,756,000	7 dok	6,661,000		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Idikatif
Dinas Sosial 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2017		2017			
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Pemerataan dan kesejahteraan	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Target 19,69%	1	06	05		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Lainnya	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	16,928,961,700	100%	16,844,482,206	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar
						01	Kegiatan Fasilitas Pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta pembinaan PKH	1120 org	1,250 org	166,496,800	1,250 org	159,490,043	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar
						02	Kegiatan Fasilitas Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang sakit atau menerima musibah lain yang menerima sembako	158 org	130 org	1,795,338,950	130 org	1,768,416,841	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar
								Jumlah warga miskin yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	5.957 org	11,653 org		11,653 org			
								Jumlah data PBI JKN yang terverifikasi	1 dok	1 dok		1 dok			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2017		2017			
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
					03	Kegiatan Fasilitas Pemberian Rastra/BPNT	Jumlah warga miskin yang menerima bantuan beras	11.889 org	11,653 org	14,678,641,100	11,653 org	14,650,932,836	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar
					04	Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-Orang Terlantar dan PMKS Lainnya	Jumlah PMKS (psikotik/eks psikotik/terlantar) yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat lanjutan ke pusat rehabilitasi/panti/yayasan/pondok/rumahnya/dll	1 org	5 org	185,461,900	6 org	166,733,036	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kota Blitar
							Jumlah klien hasil razia/penjaringan gepeng/PMKS lainnya yang dibina	18 org	72 org		89 org			
							Jumlah pelayanan/pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal	91 org	30 org		74 org			
							Jumlah psikotik yang bebas pasung	16 org	5 org		1 org			
							Jumlah fasilitas PMKS terlantar selama pengobatan/perawatan di rumah sakit/pusat rehabilitasi/yayasan/pondok/rumahnya dll	5 org	5 org		5			
					05	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan pelayanan PMKS	0 org	75 org	103,022,950	75 org	98,909,450	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2017		2017			
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi social Target 82%	1	06	06		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	100%	78%	802,006,140.00	100%	764,587,319.00	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kota Blitar
						01	Kegiatan Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial	Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti tetirah di PSPA Batu	50 org	50 org	61,600,000	50 org	61,506,230	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kota Blitar
								Jumlah fasilitasi adopsi anak	1 org	3 org		3 org			
						02	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti kegiatan HLUN	2000 org	2,000 org	380,408,700	2,000 org	375,873,300	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kota Blitar
								Jumlah peserta pembinaan Karang werda/Lansia	75 org	150 org		150 org			
								Jumlah peserta sarasehan Lansia	200 org	100 org		100 org			
						03	Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah peserta kegiatan Tagana Goes to School	300 org	300 org	359,997,440	300 org	327,207,789	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar
								Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	30 org	29 org		29 org			
								Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana	30 org	29 org		29 org			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2017		2017			
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah peserta bimtek relawan kebencanaan	30 org	29 org		29 org				
							Jumlah pemeliharaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana	2 unit	2 unit		2 unit				
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social Target 98%	1	06	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	95%	68%	1,396,960,800.00	99,70%	1,279,324,177.00	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
						01	Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	1 unit	1 unit	111,662,600	1 unit	109,393,450	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
						02	Pembinaan Juru Kunci Makam	Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	89 org	92 org	478,919,800	89 org	467,212,700	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
						03	Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan	Jumlah peserta peringatan HUT PETA	1000 org	1,000 org	301,621,600	1,000 org	247,576,350	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
							Jumlah peringatan hari Pahlawan	1 peringtn	1 peringtn		1 peringtn				
							Jumlah peserta sarasehan kepahlawanan	300 org	300 org		300 org				
							Jumlah peserta lomba melukis	250 org	250 org		250 org				
							Jumlah perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	65 org	62 org		62 org				

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2017		2017			
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
					04	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Pertuni, PWRI dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	132 org	132 org	331,378,400	132 org	312,466,350	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
							Jumlah anak yatim yang mengikuti peringatan tahun baru Islam	568 org	568 org		568 org			
					05	Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna dan LKSA yang mengikuti bimtek	70 org	70 org	173,378,400	70 org	142,675,327	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
							Jumlah PSM dan TKSK yang mengikuti Bimtek	44 org	46 org		46 org			
			1	06	08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	% PMKS terlatih	15%	20%	762,000,000	16,24	754,867,453	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
					01	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja dan masyarakat di Bidang Sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan	931 org	80 org	762,000,000	78 org	754,867,453	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
			1	06	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran	97%	100%	621,174,300	100%	608,180,298	Sekretariat	Kota Blitar
					01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rek	4 rek	87,600,000	4 rek	79,864,487	Sekretariat	Kota Blitar
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	13 unit	11 unit	7,700,000	11 unit	4,311,100	Sekretariat	Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2017		2017			
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
					03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	47 jenis	60 jenis	51,640,000	60 jenis	51,639,500	Sekretariat	Kota Blitar
					04	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	9 jenis	9 jenis	50,162,000	9 jenis	50,157,000	Sekretariat	Kota Blitar
							Jumlah lembar penggandaan	73109 lb	61,856 lb		61,856 lb			
					05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	4 jenis	4 jenis	23,409,000	4 jenis	23,409,000	Sekretariat	Kota Blitar
					06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	29 jenis	16 jenis	22,147,300	16 jenis	22,145,400	Sekretariat	Kota Blitar
					07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	1 jenis	2 jenis	20,250,000	2 jenis	18,750,000	Sekretariat	Kota Blitar
					08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos mamin yang tersedia	600 dos	700 dos	33,750,000	700 dos	33,700,000	Sekretariat	Kota Blitar
					09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	68 rapat	55 rapat	324,516,000	53 rapat	324,203,811	Sekretariat	Regional/ Nasional
			1	06	01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	225,295,536	100%	220,619,356	Sekretariat	Kota Blitar
					01	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	57,220,536	1 unit	55,630,000	Sekretariat	Kota Blitar
					02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 unit	3 unit	107,362,700	3 unit	104,762,856	Sekretariat	Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2017		2017			
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
					03	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	14,400,000	3 jenis	14,000,000	Sekretariat	Kota Blitar
					04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	32,115,800	5 jenis	32,030,000	Sekretariat	Kota Blitar
					05	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Jumlah jenis mebelair yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	14,196,500	4 jenis	14,196,500	Sekretariat	Kota Blitar
			1	06	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemkot Blitar	100%	100%	66,250,000	100%	64,226,500	Sekretariat	Kota Blitar
					01	Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	3 even	3 even	50,000,000	3 even	47,976,500	Sekretariat	Kota Blitar
					02	Penyebarluasan informasi program/kegiatan Perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2 jenis	2 jenis	16,250,000	2 jenis	16,250,000	Sekretariat	Kota Blitar
			1	06	04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	20,000,000	100%	18,756,300	Sekretariat	Kota Blitar
					01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	2 dok	2 dok	10,000,000	2 dok	9,182,300	Sekretariat	Kota Blitar
					02	Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	7 dok	7 dok	10,000,000	7 dok	9,574,000	Sekretariat	Kota Blitar

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									Kinerja	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	12	13	
Meningkatkan Pemerataan dan kesejahteraan	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Target : 1%	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	19.965.367.980	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar
						01	Kegiatan Fasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta pembinaan PKH	1.250 org	2,000 org	245.031.350		
						02	Kegiatan Fasilitasi Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang sakit atau menerima musibah lain yang menerima sembako	288 org	146 org	3.200.134.730		
								Jumlah warga miskin yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	11653 org	11,653 org			
								Jumlah data PBI JKN yang terverifikasi	1 dok	1 dok			
								Jumlah siswa SMA/SMK miskin yang menerima bantuan study kit	4.362 org	1,261 org			
						03	Kegiatan Fasilitasi Pemberian Rastra/BPNT	Jumlah warga miskin yang menerima bantuan beras	11653 org	11,653 org	16.026.410.850		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	12	13
					04	Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah peserta kegiatan Tagana Goes to School	300 org	300 org	368.896.650		
							Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	29 org	32 org			
							Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana	29 org	32 org			
							Jumlah peserta bimtek relawan kebencanaan	30 org	57 org			
							Jumlah pemeliharaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana	2 unit	2 unit			
					05	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan pelayanan PMKS	75 org	92 org	124.984.500		
	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi social Target : 82%	1	06	06	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	100%	80%	887.273.420	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kota Blitar
					01	Kegiatan Fasilitas Anak Bermasalah Sosial	Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti tetirah di PSPA Batu	50 org	50 org	59,723,800		
							Jumlah fasilitas adopsi anak	4 org	3 org			
					02	Kegiatan Fasilitas Kegiatan Kelompok Lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti kegiatan HLUN	2000 org	2,000 org	231.529.100		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	12	13
								Jumlah peserta pembinaan Karang werda/Lansia	225 org	650 org			
								Jumlah peserta sarasehan Lansia	200 org	365 org			
								Jumlah karang Werda yang mengikuti lomba KW berprestasi	0 kali	1 kali			
						03	Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-Orang Terlantar dan PMKS Lainnya	Jumlah PMKS (psikotik/eks psikotik/terlantar) yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat lanjutan ke pusat rehabilitasi/panti/yayasan/pndok/rumahnya/dll	7 org	5 org	596.020.520		
								Jumlah klien hasil razia/penjaringan gepeng/PMKS lainnya yang dibina	107 org	240 org			
								Jumlah pelayanan/pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal	165 org	50 org			
								Jumlah psikotik yang bebas pasung	17 org	5 org			
								Jumlah fasilitasi PMKS terlantar selama pengobatan/perawatan di rumah sakit/pusat rehabilitasi/yayasan/pondok/rumahnya dll	10 org	5 org			
								Jumlah peserta pelatihan penanganan psikotik	0 org	50 org			
								Jumlah peserta gelar informasi penanganan PMKS	0 org	50 org			
								Jumlah sarana/prasarana pelayanan PMKS yang tersedia	0 jenis	2 jenis			
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social Target : 98%	1	06	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	100%	72%	1.911.174.250	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
						01	Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	1 unit	1 unit	361.383.350		
						02	Pembinaan Juru Kunci Makam	Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	89 org	288 org	645.882.700		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	12	13
					03	Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan	Jumlah peserta peringatan HUT PETA	1000 org	1,000 org	228.581.800		
							Jumlah peringatan hari Pahlawan	1 peringatan	1 peringtn			
							Jumlah peserta sarasehan kepahlawanan	300 org	300 org			
							Jumlah peserta lomba melukis	250 org	300 org			
							Jumlah perintis/janda perintis kemerdekaan, veteran, DHC 45 yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	65 org	62 org			
					04	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Pertuni, PWRI dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	132 org	170 org	507.432.200		
							Jumlah anak yatim yang mengikuti peringatan tahun baru Islam	568 org	525 org			
					05	Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna dan LKSA yang mengikuti bimtek	70 org	45 org	209,346,950		
							Jumlah PSM dan TSKS yang mengikuti Bimtek	46 org	47 org			
							Jumlah peserta Bimtek Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0 org	48 org			
			1	06	08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	% PMKS terlatih	16,24%	25%	850,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
					01	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja dan masyarakat di Bidang Sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan	1.009 org	83 org	850,000,000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Kinerja	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	12	13
			1	06	01		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	% KECUKUPAN PELAYANAN PERKANTORAN	100%	100%	886.674.750	Sekretariat	Kota Blitar
						01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rek	4 rek	101.400.000		
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	13 unit	11 unit	4,700,000		
						03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	47 jenis	47 jenis	45,542,500		
						04	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	9 jenis	9 jenis	57.221.000		
								Jumlah lembar penggandaan	134965 lb	60,754 lb			
						05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	4 jenis	8 jenis	18,209,250		
						06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	29 jenis	29 jenis	28,152,300		
						07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	1 jenis	1 jenis	18,000,000		
						08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos mamin yang tersedia	600 dos	750 jenis	34,471,500		
						09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	53 rakor	60 rakor	281.498.000		Regional/ Nasional
						10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpenuhi	5 jenis	3 jenis	101.612.900		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Kinerja	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	12	13
					11	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	24.380.000		
					12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 unit	3 unit	103,503,200		
					13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara	3 jenis	1 jenis	24,965,600		
					14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	5 jenis	3 jenis	28,418,500		
					15	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Jumlah jenis mebelair yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	14,600,000		
			1	06	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemkot Blitar	100%	100%	60,000,000	Sekretariat	Kota Blitar
					01	Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	3 even	3 even	50,000,000		
					92	Penyebarluasan informasi program/kegiatan Perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2 publikasi	2 publikasi	10,000,000		
			1	06	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	9,178,000	Sekretariat	Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									Kinerja	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	12	13	
						01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	2 dok	2 dok	4,589,000		
						02	Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	7 dok	7dok	4,589,000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tabel 6.4
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kota Blitar 2019 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatkan Pemerataan dan kesejahteraan	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1%	1%	1%	1 06 04	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100	19.565.587.050	100%	20.543.866.403	100%	21.571.059.723	100%	98.427.034.165	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar	
						1 06 04 01	Kegiatan Pelayanan Jaminan Sosial bagi Warga Miskin				19.234.602.050		20.196.332.153		21.206.148.760		96.687.499.513	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar	
								Jumlah peserta pembinaan Program Keluarga Harapan	2,000 org	3,000 org		3,000 org		3,000 org		3,000 org				
								Jumlah Warga Miskin yang Sakit / mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan sembako	161 org	150 org		150 org		150 org		611 org				
								Jumlah dokumen data hasil verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN dan BDT	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		5 dok				

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
								Jumlah Warga Miskin yang mendapat tambahan kesejahteraan	11.624 org	11653 org		11653 org		11653 org		11653 org					
								Jumlah pelayanan Surat Pernyataan Miskin bagi Warga Miskin	2.698 SPM	1,000 SPM		1,000 SPM		1,000 SPM		5,000 SPM					
								Jumlah siswa SMA/SMK dari keluarga miskin yang menerima bantuan sosial	4.362 org	1.261 org		1.200 org		1.200 org		4.802 org					
								Jumlah Warga Miskin yang menerima bantuan beras	11.624 org	11.653 org		11.653 org		11.653 org		11.653 org					
								Jumlah dokumen monev dan pelaporan kegiatan pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok					
						1	06	04	02	Kegiatan Perlindungan Sosial, Korban Bencana dan Keluarga Rentan			330.985.000		347.534.250		364.910.963		1.739.534.652	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar
								Jumlah peserta kegiatan Tagana Goes to School	600 org	300 org		300 org		300 org		1.500 org					

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	32 org	32 org		35 org		35 org		35 org			
								Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketanggadaruatan	32 org	132 org		132 org		132 org		132 org			
								Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Relawan Kebencanaan	57 org	57 org		57 org		57 org		57 org			
								Jumlah Pemeliharaan/ pengadaan Sarpras Lapangan untuk Siaga Bencana	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
								Jumlah ketersediaan Bufferstock untuk penanganan pasca bencana	0	30 paket		30 paket		30 paket		90 paket			
								Jumlah peserta kegiatan peringatan HUT Tagana	0	110 org		100 org		100 org		100 org			
								Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Perlindungan Sosial, Korban Bencana dan Keluarga Rentan	0	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019	2020	2021								2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	85%	90%	90%	1	06	05		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	80%	82%	889.963.200	85%	934.461.360	90%	981.184.428	90%	4.296.994.975	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
						1	06	05	01	Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia				563.583.500		591.762.675		621.350.809		2.505.329.414	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
											Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti Tetirah di PSPA Batu	100 org	50 org		50 org		50 org		250 org			
											Jumlah Fasilitasi adopsi Anak	4 org	3 org		3 org		3 org		12 org			
											Jumlah pelayanan pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal	74 org	62 org		62 org		62 org		300 org			
											Jumlah lansia yang mengikuti peringatan HLUN	4000 org	2000 org		2000 org		2000 org		10.000 org			
											Jumlah Peserta peningkatan kapasitas Lansia	150 org	500 org		150 org		150 org		950 org			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah bantuan pendampingan perlindungan hukum bagi anak bermasalah sosial	4 org	5 org		5 org		5 org		19 org			
								Jumlah Lansia terlanjar dan PMKS Lainnya yang mendapat pelayanan sosial	56 org	10 org		10 org		10 org		86 org			
								Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok			
						1 06 05 02	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan PMKS Lainnya				326.379.700		342.698.685		359.833.619		1.791.665.560	Bidang Pelayanan dan Rehabos	Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah PMKS (psikotik/eks.psikotik) terlantar yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat perawatan lanjutan ke pusat (rehabilitasi / panti/yayasan/pondok)	10 org	5 org		5 org		5 org		25 org			
								Jumlah fasilitas PMKS/terlantar selama pengobatan / perawatan di Rumah Sakit / panti / pondok/ yayasan	10 org	5 org		5 org		5 org		30 org			
								jumlah dokumen pendataan PMKS	2 dok	1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
								Jumlah klien hasil razia/ penjarangan Gepeng/PMKS lainnya yang dibina	107 org	20 org		20 org		20 org		180 org			
								Jumlah Psikotik yang bebas pasung	17 org	3 org		3 org		2 org		25 org			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								Jumlah peserta pelatihan penanganan psikotik dengan praktek penggunaan baju restrain	50 org	0 org		50 org		0 org		100 org						
								Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	69 org	231 org		200 org		200 org		700 org						
								Jumlah sarana/prasarana pelayanan PMKS yang tersedia	2 jenis	0		0		0		2 jenis						
								Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan PMKS Lainnya	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok						
	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	99%	100%	100%	1	06	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	72%	75%	1.071.637.900	77%	1.125.219.795	80%	1.181.480.785	80%	6.792.640.858	Bidang Pelayanan dan Rehabso	Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019	2020	2021					2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						1 06 06 02	Kegiatan Pemberdayaan, Peningkatan Jejaring PSKS dan Pembinaan Kepahlawanan Keperintisan				332.671.750		349.305.338		366.770.604		2.777.709.469	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
							Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	1 unit	1 unit			1 unit			1 unit				
							Jumlah peserta peringatan HUT PETA	2000 org	1000 org			1000 org			1000 org		5000 org		
							Jumlah peringatan hari Pahlawan	2 prgtn	1 prgtn			1 prgtn			1 prgtn		5 prgtn		
							Jumlah Perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	5 org	5 org			5 org			5 org		5 org		
							Jumlah Pertuni, PWRI, Pepabri, Veteran, DHC 45 dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	170 org	355 org			355 org			355 org		355 org		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan/pengetahuan guna peningkatan pelayanan PMKS	116 org	47 org		47 org		47 org		257 org			
								Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan, Peningkatan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Kepahlawanan Keperintisan	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok			
								Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin			128.050.200		134.452.710		141.175.346		975.923.456	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
								Jumlah fakir miskin yang mendapatkan peningkatan keterampilan	0 org	30 org		30 org		30 org		90 org			
								Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan	1.093 org	500 org		500 org		500 org		2.500 org			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Jumlah KUBE yang dibentuk dan dibina	0 KUBE	3 KUBE		3 KUBE		3 KUBE		9 KUBE				
								Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin	0 org	30 org		30 org		30 org		90 org				
								Jumlah dokumen hasil verifikasi dan validasi fakir miskin	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok				
								Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok				
					1	06	06	03	Pembinaan Juru Kunci Makam dan Modin Kematian			610.915.950		641.461.748		673.534.835		3.039.007.932	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
								Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	288 org	289 org		289 org		289 org		289 org				
								Jumlah peserta pelatihan merawat jenazah	0 org	121 org		0 org		0 org		121 org				

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Pembinaan Juru Kunci Makam dan Modin Kematian	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok						
		Persentase Fakir Miskin yang mandiri	10	10	10	1	06	08		PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	% PMKS Terlatih	17,58%	30%	560.000.000	35%	850,000,000	35%	850,000,000	35%	4,911,239,096	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
						1	06	08	01	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Sosial			560.000.000		850,000,000		850,000,000		4,911,239,096	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar	
										Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan ketrampilan	1.092 org	100 org		100 org		100 org		1.392				
										Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Sosial	0 dok	1 dok		1 dok		1 dok		3 dok				

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019	2020	2021					2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						1 06 01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1.226.662.250	100%	1.287.995.363	100%	1.352.395.131	100%	5.558.900.198	Sekretariat	Kota Blitar
						1 06 01 01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran				154.885.000		162.629.250		182,985,000		797.756.463	Sekretariat	Kota Blitar
								Jumlah jenis ATK yang tersedia	47 macam	47 macam		47 macam		47 macam		47 macam			
								Jumlah barang cetakan yang tersedia	9 macam	9 macam		9 macam		9 macam		9 macam			
								Jumlah lembar penggandaan	195,719 lb	60,000 lb		70,000 lb		80,000 lb		405,719 lb			
								Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 bahan bacaan	1 bahan bacaan		1 bahan bacaan		1 bahan bacaan		1 bahan bacaan			
								Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	2,050 dos	750 dos		750 dos		750 dos		4,300 dos			
								Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	0 porsi	150 porsi		150 porsi		150 porsi		450 porsi			
						1 06 01 02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah				577.179.200		606.038.160		636.340.068		2.245.259.239	Sekretariat	regional/nasional

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	113 rakor	60 rakor		60 rakor		60 rakor		293 rakor			
						1 06 01 03	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran				52.180.000		54.789.000		57.528.450		180.412.450	Sekretariat	Kota Blitar
							Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 iuran	12 iuran			12 iuran		12 iuran		12 iuran			
							Jumlah honorarium pegawai non PNS yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan			12 bulan		12 bulan		12 bulan			
						1 06 01 04	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Perkantoran				437.455.050		459.327.803		482.294.193		2.130.643.888	Sekretariat	Kota Blitar
							Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rek	4 rek			4 rek		4 rek		4 rek			
							Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	11 unit	11 unit			14 unit		14 unit		14 unit			

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial

Tahun 2016 – 2021

										Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 komponen	8 komponen		8 komponen			8 komponen			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	------------	--	--	------------	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	29 macam	29 macam		29 macam		29 macam		29 macam			
								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 macam	3 macam		3 macam		3 macam		6 macam			
								Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5 macam	3 macam		3 macam		3 macam		8 macam			
								Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 macam	3 macam		3 macam		3 macam		3 macam			
								Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam	3 macam		3 macam		3 macam		8 macam			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

										Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit					
										Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0 unit	3 unit		1 unit		1 unit		5 unit					
										Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						1 06 01 05	Kegiatan penyusunan laporan keuangan				4.963.000		5.211.150		5.471.708		24.828.158	Sekretariat	Kota Blitar				
							Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun		5 dok	5 dok		5 dok		5 dok		5 dok							
						1 06 02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat Partisipasi Aktif Perangkat Daerah Dalam Agenda Pemkot Blitar	100%	100%	62.000.000	100%	65.100.000	100%	68.355.000	100%	321.705.001	Sekretariat	Kota Blitar				
						1 06 02 01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian				50.000,000		52.500.000		55.125.000		257.625.000	Sekretariat	Kota Blitar				
							Jumlah even daerh dan hari besar nasional yang diikuti		3 even	3 even		3 even		3 even		3 even							

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021

						1	06	02	02	Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah				12,000,000		12.600.000		13.230.000		64.080.000	Sekretariat	Kota Blitar
										Jumlah publikasi program/kegiatan Perangkat Daerah	2 publikasi	2 publikasi		2 publikasi		2 publikasi		2 publikasi				

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						1 06 03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	4.990.000	100%	5.239.500	100%	5.501.475	100%	34.482.976	Sekretariat	Kota Blitar	
						1 06 03 01	Kegiatan penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah				4.990.000		5.239.500		5.501.475		34.482.975	Sekretariat	Kota Blitar	
								Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 dok	7 dok		7 dok		7 dok		7 dok				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Blitar dalam perumusannya berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 (sebagaimana Visi dan Misi Walikota). Sebagai review dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan salah satu dari misi yang ingin dicapai Kota Blitar adalah ***Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif Yang Berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan dalam misi 3.***

Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran diatas, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, bahwa program pada dasarnya merupakan instrument kebijakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut. Adapun kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana prasarana dan anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial Kota Blitar ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar
 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Tahun 2016-2017**

No.	Indikator RPJMD	Indikator Renstra	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)		Target 2017	Realisasi 2017
			2015	2016		
1	2	3	4	5	6	
1	IndeksGini	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	7,15%	7,16%	19,69%	-1,29%
		Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial			82%	100%
		Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			98%	100%

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar
 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Tahun 2018**

No.	Indikator RPJMD	Indikator Renstra	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target 2018
			2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1	IndeksGini	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	7,16%	-1,29%	1%
		Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial		100%	82%
		Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100%	98%

Dalam rangka optimalisasi penanganan masalah sosial utamanya fakir miskin yang mendominasi angka PMKS maka dipandang perlu menyesuaikan sasaran dan indikator Renstra Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel. 7.3

**Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2019-2021**

No.	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra Sebelum Perubahan	Indikator Renstra Sebelum Perubahan (2018)	Sasaran Renstra Setelah Perubahan	Indikator Renstra Setelah Perubahan (2019-2021)	Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2021
							2019	2020	2021	
1	2				3	4	5	6	7	8
1	IndeksGini	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-1,29%	1%	1%	1%	1%
		Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	100%	85%	90%	890%	90%
		Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin dan kelembagaan sosial masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	99%	100%	100%	100%
					Persentase fakir miskin yang mandiri	NA	10%	10%	10%	10%

BAB VIII
PENUTUP

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya perubahan SOTK, penyederhaaan kegiatan dan hasil evaluasi SAKIP maka perlu disusun Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2021 guna menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan guna memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai serta digunakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Blitar untuk 5 tahun kedepan. Disamping itu Renstra juga digunakan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Blitar periode 2016-2021. Disamping itu Renstra ini juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial Kota Blitar.

Dengan tersusunya dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar diharapkan tujuan, arah dan cita-cita pembangunan di bidang sosial dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tentunya tidak terlepas dari koordinasi, kerja sama yang baik dan peran serta aktif seluruh unsur terkait.

Blitar, 18 Juli 2018
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR



Drs. Ec. PRIYO ISTANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196201181990031009